

## PENGARUH AUDIT BERBASIS RISIKO TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Wahyuni<sup>1</sup>, Isnaini Ridwan<sup>2</sup>, Nurul Hilmi<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: <sup>1</sup>[wahyuni@unismuh.ac.id](mailto:wahyuni@unismuh.ac.id), <sup>2</sup>[isnainiridwan05@gmail.com](mailto:isnainiridwan05@gmail.com), <sup>3</sup>[nhilmi751@gmail.com](mailto:nhilmi751@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh audit berbasis risiko terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan metode studi literatur. Audit berbasis risiko merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada identifikasi dan analisis terhadap area yang memiliki potensi risiko tinggi, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih fokus, efisien, dan proaktif. Dalam konteks pemerintah daerah, pendekatan ini dinilai relevan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit berbasis risiko mampu meningkatkan efektivitas pengawasan melalui peningkatan kualitas informasi audit, penyusunan rekomendasi yang lebih strategis, serta penguatan fungsi pencegahan terhadap penyimpangan. Namun demikian, implementasi pendekatan ini di daerah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem informasi, dan rendahnya tindak lanjut atas hasil audit. Dengan demikian, efektivitas pengawasan melalui audit berbasis risiko hanya dapat tercapai secara optimal apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, peningkatan kompetensi auditor, serta komitmen dari pimpinan daerah.

**Kata Kunci:** Audit Berbasis Risiko, Pengawasan Keuangan, Pemerintah Daerah, Efektivitas Pengawasan, Akuntabilitas.

### Abstract

This study aims to examine the effect of risk-based audits on the effectiveness of regional financial supervision using the literature study method. Risk-based audits are an approach that focuses on the identification and analysis of areas with high potential risks, so that supervision can be carried out in a more focused, efficient, and proactive manner. In the context of local government, this approach is considered relevant to improve the internal control system and increase accountability in public financial management. The results of the study indicate that risk-based audits can increase the effectiveness of supervision by improving the quality of audit information, preparing more strategic recommendations, and strengthening the function of preventing deviations. However, the implementation of this approach in the regions still faces obstacles

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

such as limited human resources, suboptimal information systems, and low follow-up on audit results. Thus, the effectiveness of supervision through risk-based audits can only be achieved optimally if supported by adequate institutional capacity, increased auditor competence, and commitment from regional leaders.

**Keywords:** Risk-Based Audit, Financial Supervision, Local Government, Supervision Effectiveness, Accountability.

## PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah daerah sebagai entitas publik bertanggung jawab dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan. Untuk itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika risiko yang muncul dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Audit berbasis risiko (risk-based audit) merupakan pendekatan modern dalam kegiatan audit yang menitikberatkan pada identifikasi dan evaluasi terhadap area-area yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam suatu entitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memfokuskan sumber daya audit pada aspek yang paling rawan terhadap kesalahan, kecurangan, atau penyimpangan, sehingga audit menjadi lebih efektif dan bernilai tambah. Dalam konteks pemerintahan daerah, audit berbasis risiko dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Interaksi antara penentu biaya audit dan kualitas audit menciptakan fenomena multifaset dengan implikasi luas untuk pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Biaya audit yang lebih tinggi menunjukkan upaya audit yang lebih signifikan dan peningkatan pengawasan, yang mengarah pada peningkatan kualitas audit dan peningkatan kepercayaan investor. Sebaliknya, tekanan biaya yang berlebihan atau konflik kepentingan dapat mengkompromikan independensi auditor dan merusak kualitas serta keandalan laporan keuangan, pada akhirnya mengikis kepercayaan di pasar keuangan. Mengingat peran penting biaya audit dalam memastikan integritas pelaporan keuangan, penelitian ekstensif telah dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penentuan biaya dan dampaknya terhadap kualitas audit ((Wahyuni et al., 2024)

Namun, dalam praktiknya, implementasi audit berbasis risiko di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya auditor, pemahaman terhadap manajemen risiko yang belum merata, serta integrasi antara fungsi audit internal dengan sistem pengawasan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pengaruh penerapan audit berbasis risiko terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menjadi relevan mengingat pentingnya penguatan fungsi pengawasan dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik. Dengan memahami pengaruh audit berbasis risiko terhadap efektivitas pengawasan, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi strategis yang dapat mendukung perbaikan sistem audit dan pengawasan keuangan daerah secara menyeluruh.

## TINJAUAN TEORI

Audit berbasis risiko dijelaskan sebagai pendekatan modern dalam audit yang menitikberatkan pada identifikasi area-area berisiko tinggi dalam suatu entitas. Pendekatan ini

memprioritaskan penggunaan sumber daya audit pada aktivitas yang paling rawan terhadap kesalahan atau penyimpangan. Menurut definisi dari The Institute of Internal Auditors (IIA), audit berbasis risiko adalah metodologi yang memungkinkan auditor untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko organisasi. Dengan fokus pada risiko utama, auditor dapat lebih proaktif dalam mendeteksi potensi permasalahan dan memberikan nilai tambah strategis bagi organisasi.

Pengawasan keuangan daerah adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai regulasi, serta menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Fungsi pengawasan dilakukan oleh lembaga internal (Inspektorat) dan eksternal (BPK), serta mencakup seluruh siklus pengelolaan anggaran dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Tujuan utamanya adalah mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas tata kelola publik.

Audit berbasis risiko memperkuat efektivitas pengawasan keuangan karena mampu mengarahkan pengawasan ke area yang lebih kritis dan berisiko tinggi. Pendekatan ini membantu auditor mengalokasikan sumber daya secara efisien, memberikan informasi yang berbasis analisis risiko, serta mendukung tindakan pencegahan dan perbaikan sistem pengendalian. Teori ini menekankan sinergi antara pendekatan audit risiko dan sistem pengawasan yang strategis, sistematis, serta berbasis pada analisis akar masalah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) atau studi pustaka, yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber teori, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik audit berbasis risiko dan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Melalui pendekatan ini, penulis mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis informasi dari buku, jurnal ilmiah, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan Inspektorat Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman konseptual dan empirik mengenai bagaimana audit berbasis risiko diterapkan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Studi pustaka ini bersifat kualitatif deskriptif, di mana data dan informasi yang dikumpulkan tidak diolah secara statistik, melainkan dianalisis secara sistematis untuk membangun argumen dan simpulan berdasarkan temuan-temuan dari berbagai literatur yang telah dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Audit Berbasis Risiko**

Audit berbasis risiko (Risk-Based Audit) adalah suatu pendekatan dalam proses audit yang memfokuskan perhatian dan sumber daya pada area, aktivitas, atau proses yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini menempatkan risiko sebagai dasar utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi audit, sehingga auditor dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menilai area yang paling rentan terhadap kesalahan atau penyimpangan. Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA), audit berbasis risiko adalah “suatu metodologi yang memungkinkan auditor internal untuk memberikan jaminan kepada manajemen bahwa manajemen risiko telah dijalankan secara efektif dalam mengatasi risiko-risiko utama yang dihadapi organisasi.” Dengan demikian, audit tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian dan manajemen risiko organisasi.

Pendekatan ini berbeda dengan audit konvensional yang bersifat reaktif dan berfokus pada kepatuhan terhadap aturan tertentu. Audit berbasis risiko lebih bersifat strategis karena mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mungkin berdampak besar terhadap tujuan operasional, keuangan, dan kepatuhan suatu entitas. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, audit berbasis risiko menjadi penting karena memungkinkan auditor, baik dari Inspektorat Daerah maupun lembaga pengawas eksternal seperti BPK, untuk mengalokasikan sumber daya audit secara lebih efisien, mengarahkan pengawasan pada program-program atau unit kerja yang memiliki risiko tinggi, serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, audit berbasis risiko tidak hanya menjadi alat deteksi, tetapi juga alat pencegahan dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

## **B. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk memastikan tercapainya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik. Dalam praktiknya, pengawasan ini mencakup seluruh siklus keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pengawasan dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, seperti Inspektorat Daerah, maupun oleh lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan utama dari pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, atau penyelewengan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara. Melalui fungsi pengawasan, pemerintah daerah juga didorong untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan lebih efektif dalam pencapaian program dan kegiatan pembangunan. Tak kalah penting, pengawasan keuangan berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas publik, di mana pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat secara terbuka dan jujur. Dengan pengawasan yang baik, kualitas tata kelola keuangan daerah akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

## **C. Hubungan Audit Berbasis Risiko dengan Pengawasan Keuangan**

Audit berbasis risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas pengawasan keuangan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Pendekatan audit ini dirancang untuk mengidentifikasi dan memfokuskan pengujian pada area yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, audit berbasis risiko membantu auditor maupun pengawas internal untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dengan memprioritaskan area yang paling rentan terhadap ketidakpatuhan atau pemborosan anggaran. Dalam praktiknya, audit berbasis risiko memperkuat fungsi pengawasan karena memberikan informasi yang lebih tajam dan berbasis analisis risiko terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dan potensi risiko keuangan. Informasi tersebut sangat penting dalam mendukung tindakan korektif dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong auditor dan pengawas untuk bersikap lebih antisipatif, bukan hanya reaktif terhadap kesalahan yang sudah terjadi.

Oleh karena itu, audit berbasis risiko menjadi instrumen yang relevan dalam memperkuat pengawasan keuangan yang lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada pencegahan. Dengan

mengintegrasikan audit berbasis risiko ke dalam sistem pengawasan keuangan daerah, diharapkan tercipta pengawasan yang lebih efektif dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan, mencegah penyimpangan, serta mendorong efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Hubungan antara kedua konsep ini bersifat sinergis: audit berbasis risiko meningkatkan kualitas informasi pengawasan, sementara pengawasan yang kuat akan mendorong pelaksanaan audit yang lebih responsif terhadap kondisi riil organisasi.

#### **D. Implementasi Audit Berbasis Risiko di Pemerintah Daerah**

Implementasi audit berbasis risiko di lingkungan pemerintah daerah merupakan upaya strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini mulai diterapkan secara bertahap oleh Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, audit berbasis risiko diawali dengan proses identifikasi dan pemetaan risiko terhadap seluruh kegiatan dan program pemerintah daerah, dilanjutkan dengan penilaian terhadap tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Proses implementasi ini menuntut adanya pemahaman yang kuat dari auditor terhadap konsep manajemen risiko, serta kemampuan dalam menyusun rencana audit yang berfokus pada area-area kritis. Salah satu langkah penting dalam audit berbasis risiko adalah penyusunan risk-based audit plan (RBAP) tahunan, yang digunakan untuk menentukan prioritas audit berdasarkan hasil penilaian risiko dan sumber daya auditor yang tersedia. RBAP ini menjadi acuan dalam menentukan objek pemeriksaan dan jenis audit yang dilakukan, sehingga audit menjadi lebih terfokus, tepat sasaran, dan bernilai tambah bagi pimpinan daerah.

Namun, dalam praktiknya, penerapan audit berbasis risiko di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang audit risiko, belum optimalnya sistem informasi pengelolaan risiko di OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta kurangnya integrasi antara hasil audit risiko dengan proses pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan. Selain itu, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan berbasis risiko menjadi hambatan tersendiri dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi ini. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, seperti peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan dan sertifikasi, pengembangan pedoman audit berbasis risiko, serta kolaborasi antara Inspektorat dengan BPKP, BPK, dan lembaga lain dalam membangun sistem pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis risiko. Dengan implementasi yang konsisten dan dukungan dari seluruh pihak terkait, audit berbasis risiko di pemerintah daerah dapat menjadi alat pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

#### **E. Pengaruh Audit Berbasis Risiko terhadap Efektivitas Pengawasan**

Audit berbasis risiko memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengedepankan identifikasi dan analisis risiko, pendekatan ini memungkinkan auditor dan aparat pengawasan untuk memprioritaskan pemeriksaan pada unit kerja, program, atau kegiatan yang memiliki potensi risiko tertinggi terhadap penyimpangan, ketidakefisienan, atau pelanggaran terhadap peraturan. Hal ini menjadikan pengawasan lebih fokus, terarah, dan mampu mengantisipasi masalah sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap keuangan daerah. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh sejauh mana fungsi pengawasan mampu mendorong kepatuhan, mendeteksi penyimpangan secara tepat waktu, serta memberikan

rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan tata kelola. Audit berbasis risiko memberikan kontribusi dalam ketiga aspek tersebut.

Pertama, pendekatan ini meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh dalam proses audit, karena auditor menelusuri akar masalah berdasarkan pemetaan risiko, bukan hanya berdasarkan temuan kasuistik. Kedua, audit ini membantu auditor menyusun rekomendasi yang bersifat strategis dan kontekstual, karena mempertimbangkan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, audit berbasis risiko juga memperkuat mekanisme pencegahan melalui peningkatan kesadaran risiko di lingkungan organisasi, yang pada akhirnya mendorong perubahan perilaku menuju pengelolaan yang lebih tertib dan akuntabel. Selain itu, audit berbasis risiko juga mendorong efisiensi dalam pengawasan. Dalam kondisi terbatasnya sumber daya auditor, metode ini memungkinkan pengalokasian waktu dan tenaga secara optimal ke area yang paling memerlukan perhatian. Hasil pengawasan pun menjadi lebih bernilai bagi pimpinan daerah karena memberikan gambaran yang menyeluruh dan berbasis analisis risiko atas kelemahan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, implementasi audit berbasis risiko tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga memperkuat peran strategis aparat pengawasan dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

## **F. Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas Pengawasan melalui Audit Risiko**

Meskipun audit berbasis risiko dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, implementasinya di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dievaluasi secara kritis. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman dan kompetensi aparat pengawasan internal terhadap konsep manajemen risiko dan penerapannya dalam proses audit. Banyak Inspektorat Daerah yang belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berbasis risiko secara menyeluruh, melainkan masih menjalankan audit dengan pendekatan konvensional yang berorientasi pada kepatuhan administratif semata. Hal ini menyebabkan audit belum mampu menjangkau akar masalah yang berdampak pada efektivitas kinerja keuangan dan program pembangunan daerah. Selain itu, pelaksanaan audit berbasis risiko seringkali belum didukung oleh sistem informasi dan data yang memadai. Tanpa dukungan data yang akurat dan real-time, proses identifikasi dan pemetaan risiko menjadi tidak maksimal, sehingga audit cenderung bersifat reaktif daripada proaktif. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kualitas auditor, juga menjadi hambatan dalam melaksanakan audit yang mendalam dan berbasis analisis risiko.

Di sisi lain, komitmen pimpinan daerah terhadap hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi juga sangat menentukan keberhasilan pengawasan. Jika hasil audit tidak ditindak lanjuti dengan serius, maka efektivitas pengawasan tetap rendah meskipun audit telah berbasis risiko. Dari sisi kebijakan, masih diperlukan harmonisasi antara pedoman audit berbasis risiko yang dikeluarkan oleh lembaga pusat (seperti BPKP dan KemenPAN-RB) dengan praktik di daerah, agar terdapat standar yang seragam dan relevan dengan kebutuhan lokal. Tanpa dukungan regulasi yang kuat dan pelatihan yang berkelanjutan, implementasi audit risiko akan berjalan setengah hati dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pengawasan. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis audit berbasis risiko menjanjikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, dalam praktiknya masih diperlukan upaya perbaikan menyeluruh dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan dukungan politik birokrasi. Dengan evaluasi kritis ini, dapat disimpulkan bahwa audit berbasis risiko belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Diperlukan sinergi antar lembaga pengawasan, pembedahan internal Inspektorat, dan komitmen reformasi birokrasi agar

pendekatan ini benar-benar mampu menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Audit berbasis risiko merupakan pendekatan modern dalam kegiatan audit yang memprioritaskan pengawasan terhadap area-area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui fokus pada risiko yang paling signifikan, audit ini mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit serta memperkuat pengawasan yang lebih tepat sasaran dan preventif. Dalam konteks pemerintahan daerah, audit berbasis risiko diyakini dapat memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas pengawasan keuangan, karena mampu membantu auditor dalam mendeteksi potensi penyimpangan secara lebih dini, serta menyusun rekomendasi yang strategis dan berbasis analisis risiko. Pengawasan keuangan daerah yang efektif tidak hanya bergantung pada pelaksanaan audit secara rutin, tetapi juga pada kemampuan audit untuk mengidentifikasi risiko utama dan memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan.

Audit berbasis risiko berperan penting dalam memperbaiki kelemahan pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan. Namun demikian, implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi auditor, minimnya dukungan sistem informasi, serta belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi audit. Audit berbasis risiko memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. Namun, efektivitas tersebut baru dapat tercapai secara maksimal apabila didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pendukung audit, serta komitmen dari seluruh pihak, baik auditor internal maupun pimpinan daerah. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk membenahi hambatan-hambatan yang ada, agar audit berbasis risiko tidak hanya menjadi pendekatan prosedural, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pengawasan yang lebih adaptif, efisien, dan berdampak langsung terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan khusus audit berbasis risiko, memperkuat sistem informasi pengelolaan risiko, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi audit guna meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adilah Rahmah, Dkk. 2025. Pengaruh Pengawasan Keuangan Oleh Inspekda Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagari Melalui Pemanfaatan Ti Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* Vol 6, No 1, Maret 2025(1-13)
- Yuli Dastuti, Dkk. 2022. Pengaruh Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. *Pareso Jurnal*, Vol. 4, No. 3, September 2022, Hal. 627 - 638.
- Rico Edra Saputra, Dkk. 2024. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal Pada Instansi Pemerintah Di Indonesia. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting* Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 E-Issn : 2597-5234
- Irvan Dhani Prabowo, Dkk. 2025. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan Ips* Vol. 4 No. 4 Desember-Februari 2025
- Helena Adventy Gudipung, Dkk. 2024. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka). Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi Vol. 2 No. 4 Desember 2024 E-Issn: 3031-3384, P-Issn: 3031-3392, Hal 66-81

Lasando Lumban Gaol, Dkk. 2024. Peran Teknologi Informasi Dalam Mendukung Penerapan Audit Berbasis Risiko Di Pemerintah Kabupaten Toba. Jaakfe Untan Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. (13) No. (1) (Juni) (2024), Hal (20-35)

Rudi Setiawan, Dkk. 2024. Pengawasan Keuangan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Daerah Di Kabupaten Bekasi. Jurnal Multidisiplin Inovatif Vol 8 No. 11 November 2024

Anjar Nopriyanto. 2025. Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik. Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6 No. 1, 2025

Bertuani Casella Simarmata, Dkk. 2023. Efektivitas Penerapan Risk Based Internal Auditing Dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Risiko (Studi Kasus Pt Pln Uikl Kalimantan). Jurnal Abis: Accounting And Business Information Systems Journal Vol 11 No.4 (November 2023)

Rismayanti, Dkk. 2022. Pengaruh Audit Internal Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Efektivitas Enterprise Risk Management. Akruar: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer P-Issn: 1979-1712, E-Issn: 2829-0615. Vol. 15 No. 1 1 Januari: 2022: 52-62

Wahyuni, W., Sueny, L. N. R., Wahyu, A. S., & Fadewa, N. N. (2024). Examining Audit Fee Determinants and Their Impact on Audit Quality. *Advances in Managerial Auditing Research*, 2(3), 119-129. <https://doi.org/10.60079/amar.v2i3.373>